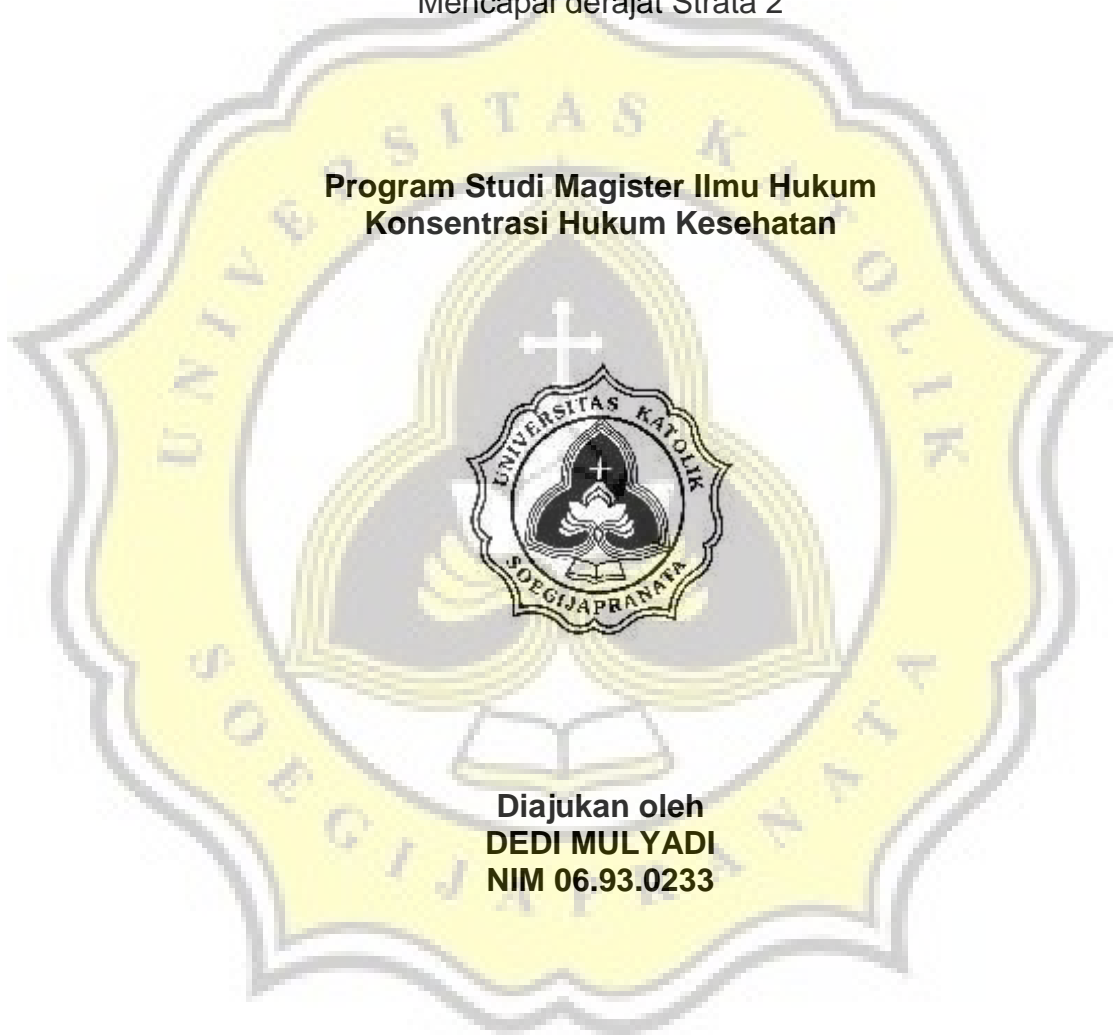


**Kebijakan Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien
Yang Tidak Mampu Membayar Menyebabkan Dipenuhinya
Fungsi Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya
Kabupaten Bandung**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Strata 2

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



Diajukan oleh
DEDI MULYADI
NIM 06.93.0233

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : DEDI MULYADI
NIM : 06.93.0233
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Konsentrasi : Hukum Kesehatan

JUDUL TESIS

**Kebijakan Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien
Yang Tidak Mampu Membayar Menyebabkan Dipenuhinya
Fungsi Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya
Kabupaten Bandung**

Disetujui Oleh

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., C.N.

Tgl.

2. Y. Budi Sarwo, SH.,MH.

Tgl
APRATA



PENGESAHAN

Tesis disusun oleh :

Nama : DEDI MULYADI

NIM : 06.93.0233

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji :

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., C.N. (.....)
2. Y. Budi Sarwo, SH.,MH. (.....)
3. Djaya Sembiring Meliala, SH., MH. (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan

Pada tanggal :

(Prof. Dr. A. Widanti S., SH., CN.)

Ketua Program Pasca Sarjana
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian tesis ini dapat diselesaikan dengan judul: **“Kebijakan Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Yang Tidak Mampu Membayar Menyebabkan Dipenuhinya Fungsi Sosial Rumah Sakit”**. Merupakan salah satu syarat akhir dalam menyelesaikan Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang.

Tesis ini membahas hubungan kebijakan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang tidak mampu membayar keterkaitannya dengan fungsi sosial rumah sakit. Terbatasnya kemampuan dan literatur yang maka penulis merasa masih belum sempurna, untuk itu penulis mengarapkan masukan, kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan penelitian tesis ini lebih lanjut.

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, M.Sc, selaku Rektor UNIKA Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, M.SA, selaku Dirut Pascasarjana. UNIKA Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., C.N.) selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang dan merangkap Pembimbing Utama yang telah membantu dan memberi masukan materi pada penulis.
4. Y. Budi Sarwo, SH.,MH. Yang telah memberikan bimbingan dan arahan pada penulis. Dikala kesibukannya kedua pembimbing telah memberikan kontribusi dan perhatian yang lebih pada penulis.
5. Djaya Sembiring Miliala, SH.,MH. Yang telah memberikan masukan dan arahan pada penulis.
6. Prof. Dr. Willa Chandrawila S, SH. yang telah mengarahkan pada penulis dalam mengambil judul tesis.

7. Handi Sobandi, SH.,MH. Yang selalu memberikan memotivasi pada penulis.
8. Mbak Shinta SE, yang selalu menginformasikan program pendidikan selama penulis mengikuti perkuliahan di UNIKA Soegijapranata Semarang.
9. Rekan-rekan angkatan IV yang selalu kompak dan kekeluarga.
10. Ibunda tercinta Hj. Idar Sudarti dan keluarga yang selalu mendo'akan dan mendukung selama penulis mengikuti pendidikan di UNIKA Soegijapranata Semarang.
11. Istriku tercinta Dwi Susanti dan anaku tersayang; Nabila, Kevin dan Chelsea yang selalu mendampingi dikala penulis menyusun tesis ini.

Semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mudah-mudahan mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tesis ini dapat bermanfaat khusus bagi penulis umumnya bagi pembaca yang lainnya.

Bandung, Mei 2009

Penulis

Dedi Mulyadi

ABSTRAK

Dalam penelitian ini berhubungan dengan hukum, artinya bahwa Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi atau penerima pelayanan kesehatan maka salah satunya didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 di dalam Pasal 7 Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pembiayaan bagi pasien yang tidak mampu membayar di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung masih dikatakan sangat tinggi yaitu 12,3 % dari 15.328 pasien dikarenakan keterkaitan status ekonomi dengan penghasilan yang sangat minim, sedangkan dana yang bersumber dari pemerintah yang dikelola oleh sektor kesehatan masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kab. Bandung, apakah sesuai Kebijakan Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Yang Tidak Mampu Membayar Menyebabkan Dipenuhinya Fungsi Sosial Rumah Sakit. Pada penelitian ini dengan menggunakan deskriptif analitik yang menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi, data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan sumbernya adalah data sekunder yang sifatnya adalah data kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui Kebijakan Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Yang Tidak Mampu Membayar Menyebabkan Dipenuhinya Fungsi Sosial Rumah Sakit status ekonomi rendah sangat berpengaruh terhadap pelayanan rumah sakit karena sangat berhubungan erat dengan tindakan yang akan dilakukan pihak rumah sakit terhadap pasien. Dalam arti hak pasien untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal dan setinggi-tingginya belum terpenuhi. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (2) fungsi social sarana kesehatan adalah bahwa menyelenggarakan kegiatan setiap sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Dan pihak bawahan tidak mengabaikan peraturan intern rumah sakit yang disyahkan oleh direktur.

Kata kunci: Kebijakan, pasien, membayar, fungsi sosial.

ABSTRACT

This study concerns about the Law, owing to the fact that the Unity State of the Republic of Indonesia is based on Law, rather than absolutism or unlimited power. To provide law protection and certainty to health services providers and beneficiaries, Article 7 of the Law No. 23/1992 specifies that the Government is required to to administer evenly distributed and affordable health services deliveries for the entire communities. Observation shows that operational cost that should be paid by Local General Hospital of Majalaya, Bandung Regency is still relatively very high, accounting for 12,3% of 15.328 total patients, owing to their economic conditions with very minimum income, while the allocated fund originating from the Government that should be managed by the health sectors were not been evenly distributed to their eligible targeted people living in poverty.

This study adopts normative judicial approach, in that it reviews legal literatures and related secondary data from Local General Hospital of Majalaya, Bandung Regency. The aim is to assess its compliance to the Policy of Providing Health Delivery Services for Low Income Patients to determine whether or not it has exercise its social function. The analysis method adopted is descriptive analytical method in providing the overall picture of the main problems. Data type used are qualitative secondary data based on primarily literature review and documentations.

The result show that the implementation of Policy of Providing Health Delivery Services for Low Income Patients affects the exercise of social functions of this Hospital, in that the implementation affects every medical and health service related actions that should be done to their patients. The study finds that the patients rights to obtain health services in optimum and at highest level have been achieved yet. Article 57 umber (2) of Law No. 23/1992 on Health Affairs specifies that the administration of any health delivery service either by governmental agency or by private sectors or the community in general should take into account the health delivery services needs of peoples living in poverty and not only been operated on profit motive alone. In addition, every subordinates should not ignore every internal regulation that has been set up by their supervisor or the Board of Directors.

Keywords . Authority, afford, patient, social function

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	HALAMAN
PERNYATAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. SISTIMATIKA PENULISAN	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGANTAR	8
B. KEBIJAKAN RUMAH SAKIT	16
1. Pengertian Kebijakan Memberikan Pelayanan Kesehatan	16
2. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan	18
C. FUNGSI SOSIAL	19
1. Pengertian Fungsi Sosial	19
2. Interaksi Sosial	23
3. Unsur-unsur Fungsi Sosial	27
D. Pengertian Rumah Sakit	
1. Fungsi Sosial Rumah Sakit	37

2. Dasar Hukum Rumah Sakit di Indonesia	41
3. Klasifikasi Rumah Sakit di Indonesia	41
4. Tugas Rumah Sakit	46
a. Karakteristik <i>Hospital Bylaws</i> :.....	51
b. Ruang Lingkup <i>Hospital Bylaws</i>	52
c. Fungsi <i>Hospital Bylaws</i>	53
b. Persyaratan Merancang <i>Hospital Bylaws</i>	54
5. Penerapan <i>Hospital Bylaws</i> di Rumah Sakit ¹	55
a. Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Medis	55
b. Konsep Mutu Dalam Pelayanan Medis	57
c. Penerapan <i>Hospital Bylaws</i> Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis di Rumah Sakit	59
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. PENGANTAR	69
B. METODE PENDEKATAN	69
C. SPESIFIKASI PENELITIAN	70
D. JENIS DATA	71
E. METODE PENGUMPULAN DATA	71
F. METODE ANALISA DATA	71
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hubungan Kebijakan Rumah Sakit Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien yang Tidak Mampu Membayar	73
B. Hubungan Kebijakan Rumah Sakit dapat Menyebabkan Dipenuhinya Fungsi Sosial Rumah Sakit.	76
C. Dampak Peraturan Internal Rumah Sakit dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien yang Tidak Mampu Membayar	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 87

B. SARAN 88

DAFTAR PUSTAKA 90

